PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN GERIATRI BAGI NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DENGAN PEMERIKSAAN RUTIN

Neva Gledy Fadhila¹

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

nevagf99@gmail.com

Jl. Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok – 16512

Abstract

This paper aims to determine the provision of geriatric health services to elderly prisoners. This study uses a descriptive qualitative approach, the data collected by researchers by conducting field studies is conducting interviews with several correctional officers to obtain data through interviews, field studies and literature reviews in explaining the provision of geriatric health services to elderly prisoners. The results showed that service delivery was constrained by costs, facilities and infrastructure as well as a lack of human resources who were experts in the health sector. Elderly prisoners do not get the geriatric care that should be done so that elderly prisoners receive treatment and prevention of diseases and health problems due to aging. This can be handled by carrying out routine checks on inmates. Not only examinations but also counseling activities about the health experienced by elderly prisoners. This examination is carried out by the prison in collaboration with the regional health office and is carried out regularly every week. With this routine check-up, elderly prisoners can overcome their health problems and prevent diseases that usually attack a person due to aging.

Keywords: *elderly prisoners, health, geriatrics; services*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemberian pelayanan kesehatan geriatri kepada narapidana lansia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan melakukan studi lapangan adalah melakukan wawancara kepada beberapa petugas pemsarakatan untuk memperoleh data melalui wawancara, studi lapangan dan kajian literatur dalam menjelaskan pemberian pelayanan kesehatan geriatri kepada narapidana lansia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pelayanan terkendala dengan biaya, sarana dan prasarana serta kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidang kesehatan. Para narapidana lansia tidak mendapatkan perawatan geriatri yang seharusnya dilakukan agar narapidana lansia tersebut mendapatkan penanganan serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan akibat penuaan. Hal ini dapat ditangani dengan melakukan pemeriksaan secara rutin kepada narapidana. Tidak hanya pemeriksaan tetapi juga kegiatan konseling tentang kesehatan yang dialami oleh narapidana lansia. Pemeriksaan ini diadakan oleh pihak Lapas yang bekerja sama dengan dinas kesehatan daerah serta dilakukan secara rutin setiap minggu. Dengan adanya pemeriksaan rutin ini, narapidana lansia dapat mengatasi gangguan kesehatan yang dialami dan mencegah datangnya penyakit yang biasanya menyerang seseorang karena penuaan.

Kata Kunci: *geriatri; kesehatan; narapidana lansia; pelayanan*

PENDAHULUAN

Setiap manusia harus dijamin hak – hak manusianya, termasuk dengan narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Hak – hak narapidana sudah diatur di dalam pasal 14 Undang – Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa narapidana memiliki “hak mendapatkan pelayanan keehatan dan makanan yang layak”(Indonesia, 1995). Pelayanan kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan dipandang kurang memenuhi. Pelayanan yang dilakukan hanya sebatas pemberian obat dan pertolongan pertama pada kejadian atau narapidana mengalami luka dan sakit. Tenaga kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan dirasa kurang karena keterbatasan dokter dan perawat. Tidak semua Lembaga Pemasyarakatan memiliki dokter di polikliniknya, bahkan biasanya hanya ada perawat dan petugas lain yang ditugaskan di poliklinik karena kurangnya petugas kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan umumnya adalah untuk narapidana dengan sakit ringan. Apabila narapidana mengalami sakit parah, maka akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Pelayanan kesehatan kepada kelompok rentan dirasa kurang memadai. Kelompok rentan adalah orang tua atau lansia, perempuan, dan orang yang menyandang disabilitas.

Pelayanan kesehatan kepada lansia dirasa kurang memadai. Kebanyakan fasilitas di lembaga pemasyarakatan dirancang hanya untuk orang muda, bukan untuk memberikan perawatan kepada lansia. “lembaga pemasyarakatan sering tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan lansia dengan kondisi medis yang kompleks”(Bedard & Metzger, n.d.). Blok hunian yang sempit karena dipenuhi oleh banyaknya narapidana yang overcrowded, kamar mandi yang rendah, blok kamar yang gelap dan kurang ventilasi, membuat narapidana lansia kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari – hari. Manusia yang berumur diatas 60 tahun harus mendapatkan perlakuan khusus. “perlakuan khusus adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan guna membantu lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya”(Kesehatan, 2015). Oleh karena itu, narapidana lansia di lembaga pemasyarakatan membutuhkan perawatan kesehatan khusus terkait dengan perawatan untuk lansia, yaitu perawatan geriatri.

Pelaksanaan perawatan kesehatan untuk lansia dilaksanakan dengan diadakannya pengecekan secara rutin. Menurut peraturan pemerintah republik Indonesia No 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga Binaan pemasyarakatan pasl 16 ayat (1) dikatakan bahwa “pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dicatat dalam kartu kesehatan”. Sedangkan beberapa lapas di Indonesia sangat jarang yang melaksanakan aturan tersebut, bahkan tidak melaksanakannya sama sekali. “Pengecekan rutin kesehatan yang dilakukan di unit pelayanan kesehatan pada

lembaga pemasyarakatan hanya dilakukan 1-3 kali dalam satu tahun"(Dagi, 2017). Pelayanan kesehatan kepada narapidana lansia juga terhambat oleh keterbatasan tenaga medis di dalam lapas. "menyetujui diadakannya tim medis di lembaga pemasyarakatan"(Pemasyarakatan et al., 2019). Dengan diadakannya pemeriksaan secara rutin dan penambahan tim medis, pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan cukup baik. Pemberian pelayanan kesehatan kepada narapidana lanjut usia selama 3 kali dalam satu tahun, dianggap tidak efektif. Melihat narapidana lansia yang memiliki penyakit atau yang biasanya dikenal dengan penyakit orang tua, membutuhkan pemeriksaan yang intensif. Apabila hanya dilakukan selama 3 kali dalam satu tahun, dapat menyebabkan penurunan kesehatan narapidana lansia bahkan narapidana lansia tersebut tidak dapat mengatasi sakit yang sedang dialami. Untuk mengatasi masalah tersebut, lembaga pemasyarakatan harus melaksanakan pelayanan kesehatan secara rutin. Pelayanan kesehatan bagi narapidana lansia dapat dilaksanakan selama 1 kali dalam satu minggu. Pemberian pelayanan dan perawatan geriatri bagi narapidana lansia dilaksanakan dengan melakukan kerja sama dengan tim medis dari luar lembaga pemasyarakatan.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu. Dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa persiapan yaitu penelitian lapangan, identifikasi masalah, perumusan masalah, dan menentukan tujuan dilaksanakannya penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran – gambaran permasalahan yang akan diteliti. Masalah pada pemberian pelayanan kesehatan kepada narapidana lansia akan diperlihatkan dan akan dibahas secara mendalam. Data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan melakukan studi lapangan adalah melakukan wawancara kepada beberapa petugas pemasyarakatan untuk memperoleh data primer. Peneliti melakukan wawancara pada saat kegiatan praktik kerja lapangan berlangsung. Peneliti juga melakukan study kepustakaan dengan membaca banyak literature dan mengumpulkan data tentang pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan serta hak – hak narapidana.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dengan mengolah data – data yang dikumpulkan dan menguraikan data – data tersebut dalam bentuk kalimat yang sistematis, teratur, dan terstruktur agar mudah dipahami. Penjelasan tentang pemberian pelayanan kesehatan geriatri kepada narapidana lansia akan dituliskan secara mendalam dan teoritis. Dalam penelitian ini, penulis memberikan saran dan masukan terhadap

berlangsungnya pemberian pelayanan kesehatan geriatri kepada narapidana lansia. Pemberian pelayanan kesehatan geriatri kepada narapidana lansia dilaksanakan secara rutin setiap satu bulan atau satu minggu sekali. Pemberian saran tersebut dimaksudkan agar pemberian pelayanan kesehatan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut pasal 1 nomor 7 Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana yaitu terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Selama menjalani masa pemidanaan, narapidana memiliki hak – hak yang telah diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- l. Mendapatkan hak – hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Hak – hak narapidana tersebut juga berlaku kepada narapidana lansia. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, “Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas”. “Dengan demikian, akan terjadi penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik, maka diperlukan perawatan sehari – hari yang cukup” (Pemasyarakatan et al., 2019). Penanganan kesehatan kepada narapidana lanjut usia diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia yang berbunyi:

- a. Pemberian bantuan akses keadilan;
- b. Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial
- c. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan

d. Pelindungan keamanan dan keselamatan

Narapidana lanjut usia berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, sehingga pada setiap lembaga pemasyarakatan disediakan sekurang – kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. “Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan dan apabila pada saat hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut harus dirawat secara khusus” (Firmansyah et al., 2019). “Apabila narapidana tersebut memerlukan perawatan lebih lanjut, maka tim medis dari lembaga pemasyarakatan akan memberikan rekomendasi kepada kepala lembaga pemasyarakatan agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar lembaga pemasyarakatan serta wajib dikawal oleh petugas lembaga pemasyarakatan dan bila perlu bantuan dari pihak kepolisian untuk pengawalan” (Firmansyah et al., 2019).

Faktor – faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan kepada narapidana lansia

“Meningkatkan kesehatan dan keselamatan warga binaan pemasyarakatan berarti membuktikan bahwa di lembaga pemasyarakatan perlu memperhatikan kesehatan narapidana lanjut usia, mengingat narapidana lanjut usia sudah rentan akan penyakit” (Jaya et al., 2020). “Pelayanan kesehatan untuk narapidana lansia di Indonesia, kurang memadai. Kebanyakan fasilitas lapas dirancang untuk membatasi kebebasan narapidana muda, bukan untuk memberikan perawatan optimal untuk narapidana lansia”(Bedard & Metzger, n.d.). Akibatnya, lembaga pemasyarakatan tidak memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal untuk narapidana lansia. Ada beberapa faktor yang menghambat pemberian pelayanan kesehatan kepada narapidana lansia, diantaranya:

1. Tenaga medis

“Kurangunya tenaga medis di Lembaga Pemasyarakatan membuat pemberian pelayanan kesehatan kepada narapidana lansia menjadi terhambat”(Sanusi, 2016). Pemasyarakatan tidak memiliki tenaga medis yang dikhususkan untuk menangani para narapidana lansia. Hal ini membuat para narapidana lansia tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan keluhan tentang kesehatannya.

2. Sarana dan prasarana

Meningkatkan kesehatan dan keselamatan warga binaan pemasyarakatan berarti membuktikan bahwa di lembaga pemasyarakatan perlu memperhatikan kesehatan narapidana lanjut usia mengingat narapidana lanjut usia rentan terhadap penyakit. Dalam meningkatkan kesehatan bagi narapidana lanjut usia, maka dilakukana

upaya antara lain melalui pencegahan, penyembuhan dan peningkatan pelayanan kesehatan diantaranya pemberantasan penyakit menular, meningkatkan gizi narapidana lanjut usia, peningkatan persediaan obat-obatan, dan peralatan kesehatan yang memadai (Rohaedi et al., 2016).

Pemberian pelayanan kesehatan geriatri kepada narapidana lansia

Narapidana lansia membutuhkan perawatan kesehatan yang dapat membantu mereka dalam mengatasi dan menyembuhkan sakitnya. Di dalam lembaga pemasyarakatan penting untuk menggunakan ilmu geriatri dalam memberikan pelayanan kepada narapidana lansia untuk perawatan mereka. "Geriatric adalah bidang kedokteran yang bertujuan untuk mengoptimalkan kesehatan, fungsi, kemandirian, dan kualitas hidup pasien lansia melalui lensa penilaian bio-psiko-sosial dan pengobatan" (Sosiologi et al., 2016). "Bidang perawatan geriatri mengambil pendekatan yang berpusat pada pasien untuk memprioritaskan dan menilai risiko serta manfaat berbagai intervensi berbeda yang ditawarkan kepada pasien dengan beberapa kondisi medis dan disabilitas melalui penilaian yang komprehensif terhadap tujuan perawatan pribadi mereka" (Bedard & Metzger, n.d.). Narapidana lansia dalam mendapatkan perawatan geriatri diantaranya adalah karena lansia mengalami beberapa gangguan, yaitu:

1. Gangguan kognitif
Perubahan kognitif atau perubahan perilaku yang sering disertai demensia dapat membuat narapidana lansia untuk melakukan tindakan tak beralasan.
2. Gangguan sensor
Narapidana lansia yang berusia >60 tahun banyak mengalami gangguan pendengaran dan narapidana lansia yang berusia > 80 tahun ditambah dengan gangguan penglihatan. Gangguan pendengaran dan penglihatan ini menjadi tantangan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan.
3. Gangguan kesehatan mental dan isolasi
Kesehatan mental para narapidana lansia dapat dipengaruhi oleh perasaan terisolasi di dalam blok. Perasaan cemas dimana narapidana lansia menghawatirkan kapan mereka akan bebas.

Pemberian perawatan geriatri ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia yang berisi "Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan diberikan dalam bentuk pemberian perawatan geriatri/gerontologik". Dalam pelaksanaannya, pihak dari lembaga pemasyarakatan membentuk tim medis yang khusus untuk menangani perawatan geriatri untuk narapidana lansia. Apabila tim medis tidak dapat melaksanakan perawatan geriatri kepada narapidana lansia, maka dilakukan bentuk kerja sama dengan pihak ketiga

atau dinas kesehatan atau yang lainnya dari luar lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan perawatan geriatri kepada narapidana lansia. Bentuk kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Upaya pemberian pelayanan kesehatan geriatri bagi narapidana lansia

“Saat pertama kali masuk kedalam lembaga pemasyarakatan atau saat menjadi narapidana baru, narapidana lansia akan menjalani evaluasi geriatri untuk mengetahui apakah narapidana tersebut mengalami sindrom geriatri atau tidak” (Bedard & Metzger, n.d.). Apabila narapidana lansia tersebut mengalami sindrom geriatri, maka akan dibuatkan rekomendasi untuk mengatasinya, yaitu dengan mendapatka pemeriksaan secara rutin untuk mengatasi sindrom tersebut. “Contoh yang termasuk kedalam sindrom geriatri adalah sering jatuh, penurunan kognitif dan demensia, inkontinensia, gangguan sensorik, dan polifarmasi” (Bedard & Metzger, n.d.). Oleh karena itu, pemberian pelayanan kesehatan geriatri bagi narapidana lansia sangatlah dibutuhkan. Upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Menambah dana

Dana menjadi salah satu faktor yang membuat hambatan bagi pelayanan kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan. Kurangnya dana, menjadikan sarana dan prasarana serta obat – obatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana menjadi tidak memadai. Dalam hal ini, sangat diharapkan kepada pemerintah untuk menambah atau memberikan bantuan dana kepada lembaga pemasyarkatan.

2. Menambah tenaga medis

Kurangnya jumlah tenaga medis serta kurangnya tenaga medis yang handal dibidangnya, menjadi hambatan dalam pemberian pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan.

3. Pelayanan rutin

Pemberian pelayanan kesehatan secara rutin sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 16 ayat (1) yaitu “Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan”. Sedangkan di beberapa lembaga pemasyarakatan , banyak yang tidak melaksanakan aturan tersebut. Beberapa lembaga pemasyarakatan melaksanakan pemeriksaan kesehatan 1 (satu) kali dalam satu tahun. Hal ni perlu ditindaklanjuti, karena kesehatan narapidananya sangat penting.

KESIMPULAN

Hak pelayanan kesehatan bagi narapidana lansia, memang mengalami beberapa kendala. Diantaranya adalah kurangnya tenaga medis dan sarana serta prasarana yang kurang mendukung di setiap Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana lansia memerlukan perawatan geriatri untuk membantu mereka mengatasi masalah di hari tua. Masalah tersebut biasanya adalah gangguan kognitif, gangguan sensor, dan gangguan mental. Oleh karena itu, narapidana lansia memerlukan perawatan geriatri secara rutin. Pelaksanaan perawatan geriatri kepada narapidana lansia dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Pelaksanaan pelayanan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan upaya untuk mengatasi beberapa kendala yaitu, menambah jumlah dana dan tenaga medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bedard, R., & Metzger, L. (n.d.). *Tahanan yang menua: Pengantar untuk tantangan perawatan kesehatan geriatri di lembaga pemasyarakatan (LP)*.
- Dagi, olivia felicya. (2017). *PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA*. 48.
- Firmansyah, R., A.Rani, F., & Adwani, A. (2019). Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 433. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p10>
- Indonesia, R. (1995). *undang undang no 12 tahun 1995*.
- Jaya, B., Barus, P., Biafri, V., Ilmupemasyarakatan, P., Bpsdm, P., Dan, H., & Ri, H. A. M. (2020). *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I*. 7(1), 135–148.
- Kesehatan, M. (2015). *Berita Negara. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 65(879), 2004–2006*. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btk045>
- Pemasyarakatan, L., lia, K., & Palopo, K. (2019). *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Volume 2 , No . 2 , Oktober 2019 Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal*. 2(2), 39–44.
- Rohaedi, S., Putri, S. T., & Karimah, A. D. (2016). *Tingkat Kemandirian Lansia Dalam Activities Daily. Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 2(1), 17.
- Sanusi, A. (2016). *Aspek Layanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(1), 37–56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.37-56>
- Sosiologi, J., Humanis, P., Gerontologi, S., Di, S., Sepuh, P., & Magelang, P. (2016). *J s p h*. 1, 47–55.